

**LAMPIRAN XXXIX
PERATURANBUPATI
KARANGANYAR
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2024**



**RENCANA KERJA
KECAMATAN KEBAKKRAMAT
TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2023**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL..... iii

KATA PENGANTAR..... iv

BAB I PENDAHULUAN

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Landasan Hukum..... 2

 1.3 Maksud dan Tujuan 6

 1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU..... 8

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan
 Capaian Perangkat Daerah 8

 2.2 Analisi Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 9

 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat
 Daerah..... 15

 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 20

 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 26

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 27

 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 27

 3.2 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah..... 28

 3.3 Program dan Kegiatan Berisikan Penjelasan 29

 3.4 Tantangan dan Peluang..... 30

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN..... 40

BAB V PENUTUP..... 44

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian Kinerja Program Unsur Kewilayahan	10
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja dan Renstra	11
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan.....	15
Tabel 2.4	Pemetaan Permasalahan.....	18
Tabel 2.5	Riview Terhadap Rancangan Awal	21
Tabel 2.6	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat....	26
Tabel 3.1	Tujuan dan sasaran	27
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan.....	31
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan 2024.....	41

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Rencana Kerja Kecamatan Kebakkramat Tahun 2024 dapat disusun. Rencana kerja ini secara garis besar mengupas tentang visi misi, nilai, tujuan strategis, sasaran dan target strategis Kecamatan Kebakkramat. Selain itu, juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang terhubung langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai. Karena secara Institusi Renja ini sebagai wujud pelaksanaan tanggung jawab Camat dalam memenuhi tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.

Renja OPD ini merupakan perwujudan dan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang pembuatan dan sistematika Renja OPD dan Dasar Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang penyusunan Sistem Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Karanganyar.

Dengan segala keterbatasan perumusan dokumen Renja ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu di sini. Kami menyadari Rencana Kerja ini masih banyak kekurangannya, kami mengharapkan adanya saran, masukan yang sifatnya membangun guna meningkatkan kinerja Kecamatan Kebakkramat.

Kebakkramat, Juli 2023
CAMAT KEBAKKRAMAT

JOKO SUTRISNO, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19680305 199003 1 010

BAB I

PENDAHULUAN

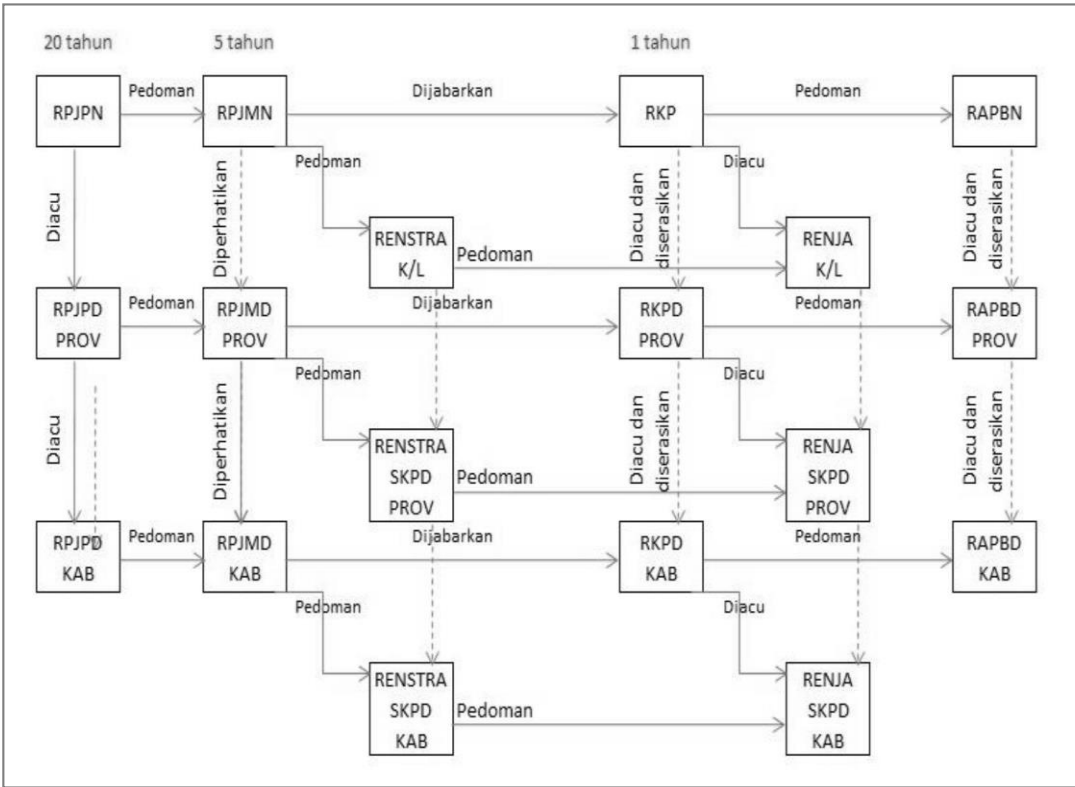
1.1 Latar Belakang

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026 dan disusun dengan menggunakan 4 pendekatan yaitu teknokratik, partisipatif, politis serta atas bawah dan bawah atas. Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Rencana Kerja Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Kebakkramat untuk periode Tahun 2024 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Karanganyar dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) Tahun di Tahun 2024. Renja Kecamatan Kebakkramat Tahun 2024 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Kebakkramat Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut

Gambar 1.1
Hubungan dan Hieraki Perencanaan Pembangunan



1.2 Landasan Hukum

Beberapa peraturan perundang-undangan yang melandasi penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA-OPD) Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan; Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung dan Kawasan Karanganyar – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 111);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 134);
28. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 11).

29. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 16).
30. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 34).

1.3 Maksud dan Tujuan

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar memandang perlu untuk menyusun rencana kerja sebagai bagian dari fungsi manajemen perencanaan. Proses perencanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta penetapan capaian kinerja yang diharapkan pada tahun mendatang. Adapun maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan serta pertimbangan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar;
2. Sebagai bahan acuan dan arah bagi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar;
3. Sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan pengawasan secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku.

Tujuan yang ingin dicapai dan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 ini antara lain:

- Kegiatan-kegiatan yang sudah disusun oleh Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar dapat berjalan selaras dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar;
- Pelaksanaan kegiatan dapat lebih terarah dan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan baik kuantitas maupun kualitasnya;
- Arah kebijakan pengawasan dapat lebih profesional serta lebih nyata dapat dirasakan oleh Organisasi Perangkat Daerah maupun masyarakat Kabupaten Karanganyar secara umum.

1.1 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam Rencana Kerja Kecamatan Kebakkramat disajikan dalam 5 (lima) bab. Dalam setiap bab memiliki sub bab sebagai

perincian dari bab-bab tersebut. Sistematika Rencana Kerja Kecamatan Kebakkramat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja Kecamatan Kebakkramat, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD.
- 1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya
- 1.3 Maksud dan Tujuan
Membuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Kebakkramat.
- 1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Kebakkramat, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN

KEBAKKRAMAT TAHUN 2022

- Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja Kecamatan Kebakkramat tahun lalu (2022).
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kebakkramat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Kebakkramat
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kebakkramat
 - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kebakkramat
 - 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok fungsi OPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

KEBAKKRAMAT

Memuat tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan, kaidah kaidah pelaksanaan dan tidak lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN KEBAKKRAMAT TAHUN YANG
LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kebakkramat Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Kebakkramat Tahun 2018-2023

Rencana Kerja Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 merupakan implementasi tahun kelima dari Rencana Strategis Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023. Perumusan Renja Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 didahului dengan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Renja Tahun 2024.

Evaluasi Renja Tahun Anggaran 2022 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan dokumen perencanaan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar, sehingga hasil evaluasi target kinerja 2022 dapat menilai efektifitas pelaksanaan dokumen perencanaan yang telah dibuat. Rincian pencapaian kinerja Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Alokasi anggaran sebesar Rp. 153.168.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 152.099.500,00 atau 99,9% dan realisasi fisik 99,9% yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :

- a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor setiap bulannya dengan lancar dan tertib.
- b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

2. Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Alokasi anggaran sebesar Rp. 68.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 67.537.000,00 atau 99,3% dan realisasi fisik 99,3% yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :

- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

3. Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Alokasi anggaran sebesar Rp. 100.430.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 95.350.557,00 atau 94,9% dan realisasi fisik 94,9% yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :

- a. Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- b. Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor.

4. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Alokasi anggaran sebesar Rp. 22.371.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 22.371.000,00 atau 100% dan realisasi fisik 100% yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

5. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran sebesar Rp. 46.600.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 44.800.000,00 atau 96,1% dan realisasi fisik 96,1% yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :

- a. Sinergritas Dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

6. Program Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

Alokasi anggaran sebesar Rp. 12.750.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.750.000,00 atau 100% dan realisasi fisik 100% yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :

- a. Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa.

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja Tahun 2022 pada Renstra Tahun 2018-2023 menunjukkan tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel berikut ini

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Program Unsur Kewilayahan Tahun 2022

No	Program	Indikator	Satuan	Tahun 2022					Tahun Terakhir RPJMD (2023)			
				Target	Capaian	%	Status		Target	%	Status	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KECAMATAN KEBAKKRAMAT												
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	74	81	109,46	Sangat Tinggi	Tercapai	75	108,00	Sangat Tinggi	Sudah Tercapai
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	90	100	111,11	Sangat Tinggi	Tercapai	90	111,11	Sangat Tinggi	Sudah Tercapai
3.	Program Koordinasi Ketentraman Dan	Persentase Wilayah Dalam Keadaan	%	90	81	90,00	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	90	90,00	Sangat Tinggi	Akan Tercapai
Keterlibatan Umum												
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Desa Memiliki Apbdes Dan Rkpdes Sesuai Ketentuan	%	99,6	97	97,39	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	99,7	97,29	Sangat Tinggi	Akan Tercapai
5.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Wilayah Tertib Perda	%	90	83	92,22	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	90	92,22	Sangat Tinggi	Akan Tercapai

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar tahun lalu (2022) dan tahun berjalan (2023), maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan Selanjutnya kaitan antara realisasi program dan kegiatan Renja dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Kebakkramat dan Pencapaian Renstra Kecamatan Kebakkramat s/d Tahun 2022 Kabupaten Karanganyar

NO	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11)
	KEWILAYAHAN									
	KECAMATAN KEBAKKRAMAT									
	KECAMATAN	NILAI SAKIP								
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	70	100	100	100	100		100	100
	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN		70	-		1Tahun	93	61	1Tahun	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		70	-		1Tahun	100	74	1Tahun	
	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor		70	100		1Tahun	97	72	1Tahun	
	Penyediaan Peralatan Rumah tangga		70	100		1Tahun	100	61	1Tahun	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		70	100		1Tahun	99	63	1Tahun	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		70	100		1Tahun	93	60	1Tahun	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		70	100		1Tahun	100	75	1Tahun	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		70	100		1Tahun	99	60	1Tahun	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		70			1Tahun	100	100	1Tahun	
	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya		70			1Tahun	99	85	1Tahun	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		70			10 orang	100		10 orang	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		70	94,90		1Tahun	85	85	1Tahun	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		70	99,81		1Tahun	100	66	1Tahun	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		70			3 Jenis	100		3 Jenis	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK		75	100	100	100	100	81	100	81
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal		75	100		1 Tahun	100	81	1 Tahun	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		90	100	100	100	100	100	100	100
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa		90	100		1 kegiatan	100		1 kegiatan	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		90	100		1 Tahun	100	100	1 Tahun	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN		90	100	100	96	96	100	100	100
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indoneasi, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		90	100		1Tahun 10 Orang	96	100	1Tahun 10 Orang	
5	PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		99,7	100	100	100	100	100	100	100
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatua Republik Indonesia		99,7	100		1Tahun	100	100	1Tahun	
6	PROGRAM, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		90	100	100	100	100	100	100	100
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		90	100		1Tahun	100		1Tahun	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Kebakkramat merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sebagai dasar tugas pokok dan fungsi Camat telah diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar
2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Karanganyar dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain:

- a. Meningkatnya kemampuan para pengelola keuangan tingkat Kecamatan dan Desa
- b. Meningkatnya pemberdayaan lembaga dan masyarakat desa
- c. Meningkatnya kerukunan antar umat beragama
- d. Meningkatnya tertib pelaporan SKPD
- e. Meningkatnya peran PKK dalam kehidupan bermasyarakat
- f. Indek kepuasan masyarakat.

Lingkup analisis kinerja Pelayanan di Kecamatan Kebakkramat meliputi Analisis Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internaal maupun eksternal, serta dampak terhadap masa depan Organisasi yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi, Faktor kunci keberhasilan ditentukan oleh :

1. Lingkungan Internal
Kekuatan :
 - a. Tersedianya anggaran untuk pengadaan barang dan jasa;
 - b. Terdapatnya budaya gotong royong yang terus dilestarikan dan telah di tetaapkan payung hukumnya;
 - c. Terdapatnya Organisasi/lembaga kemasyarakatan desa yang dibentuk dengan mendasarkan Perda kabupaten Karanganyar Nomor 26 Tahun 2006;
 - d. Terdapatnya Tri Kerukunan Umat beragama;
 - e. Terdapatnya Tokoh agama dari masing-masing agama;
 - f. Adanya undang-undang yang mengatur dan menjamin stabilitas nasional;
 - g. Tingginya Kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban daaerah.

Kelemahan :

- a. Masih banyak penduduk miskin;
- b. Masih ada pandangan bahwa pembangunan adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah saja;
- c. Kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama;
- d. Masih rendahnya kualitas SDM;
- e. Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

2. Lingkungan Eksternal

Peluang :

- a. Terdapatnya kebijakan pemerintah pusat yang mengatur tentang kewenangan pengadaan barang dan jasa bagi; OPD;
- b. Adanya kebijakan pemberdayaan masyarakat
- c. Adanya Dana pembangunan yang langsung melibatkan masyarakat;
- d. Terdapat kehidupan toleransi antar umat beragama;
- e. Terdapat usaha ketahanan bersama masyarakat dan aparat keamanan.

Ancaman :

- a. Rendahnya koordinasi dan sinkronisasi pembangunan masyarakat dalam membangun desa;
- b. Tingkat kompetitif yang rendah antar desa dalam masyarakat desa;
- c. Munculnya paham agama yang radikal dan ekstrim;
- d. Masih minimnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelaksanaan operasional.

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Kebakkramat berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kebakkramat
Kabupaten Karanganyar

NO	Indikator	SPM/sta ndar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Tujuan: Meningkatkan Daya Saing Daerah		Nilai SAKIP	72,78	67	69	70	72,78	67	69	70	
2	Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan		IKM	69	85	84,1	75	69	85	84,1	75	

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kebakkramat

Tahun 2023 merupakan tahun politik dimana masa jabatan Bupati karanganyar akan berakhir pada periode Tahun 2023. Dan selanjutnya akan diadakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk mengisi kekosongan jabatan pada periode berikutnya. Untuk itu pemerintah berupaya mengagendakan kebijakan Normal Baru agar dampak ekonomi akibat pandemi tidak sampai menimbulkan krisis yang berkepanjangan. Oleh karena itu perlu disusunnya RPJMD Baru termasuk perubahan Renstra mengingat pada tahun 2020 semua Program dilakukan pengalihanfokus untuk penanganan Covid-19.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Kebakkramat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Permasalahan Sekretariat:
 - a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;
 - b. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik.
 - c. Belum optimalnya kualitas dokumen perancaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - d. Kurang memadaianya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;
2. Seksi Tata Pemerintahan
 - a. Kurangnya kualitas SDM aparatur desa dalam pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Masih rendahnya disiplin aparatur desa;
 - c. Kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan desa;
 - d. Belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan desa;
 - e. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. Belum optimalnya sosialisasi Perda;
 - b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
 - c. Belum optimalnya pembinaan Linmas desa;
 - d. Belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI);
 - e. menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat.
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah desa;
 - b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam

- pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
 - c. Masih kurangnya pemahaman aparat desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan;
 - d. Masih rendahnya kemampuan analisis Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan pembangunan.
5. Seksi Kesejahteraan Sosial
- a. Belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial;
 - b. Kurang beragamnya kegiatan pemberdayaan perempuan;
 - c. Masih tingginya tingkat pengangguran;
 - d. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat desa;
6. Permasalahan Umum di luar tuisi

Kurang representatifnya Kantor Kecamatan Kebakkramat

Kedudukan Kantor Kecamatan Kebakkramat yang berada di tengah pusat kota kabupaten seharusnya memiliki ruang tempat kerja yang representatif baik penataan kantor maupun tempat parkir, kondisi saat ini bahwa ruang kerja camat dan staf dirasa kurang memadai. Karena bangunan saat ini yang digunakan masih bangunan lama sehingga dipandang perlu untuk diadakan rehab agar penataan ruang kerja camat dan staf bisa tertata demi kenyamanan dan pelayanan pada masyarakat dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Bertitik tolak dari pengertian isu strategis diatas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kebakkramat, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Kebakkramat yang berhasil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Kecamatan Kebakkramat

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
1	Belum optimalnya pelayanan publik dan profesionalisme aparatur masih perlu ditingkatkan	a. terbatasnya jumlah aparat/ pegawai di kecamatan dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal; b. belum optimalnya pemahaman aparatur terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing; c. belum meratanya kompetensi dan pendidikan sumber daya aparatur d. belum optimalnya penerapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang; e. masih lemahnya koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran f. masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat; g. masih kurangnya sistem pengendalian internal dalam proses pengelolaan keuangan di kecamatan; h. belum optimalnya pengelolaan aset di kecamatan; i. belum optimalnya sistem kearsipan di kecamatan	Seksi Tata Pemerintahan a. kurangnya kualitas SDM aparatur desa dalam pelayanan kepada masyarakat; b. masih rendahnya disiplin aparatur desa; c. kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan desa; d. belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan desa; e. belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum a. belum optimalnya sosialisasi Perda; b. masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum; c. belum optimalnya pembinaan Linmas desa; d. belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI); e. menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat Seksi Pemberdayaan Masyarakat a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah desa; b. belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah; c. masih kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan; d. masih rendahnya kemampuan analisis Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan pembangunan. Seksi Kesejahteraan Sosial a. belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial; b. kurang beragamnya kegiatan pemberdayaan keluarga miskin. c. masih tingginya tingkat pengangguran; d. kurangnya pemaham tentang kesehatan pada masyarakat desa. Seksi Pelayanan Umum a. Belum Optimalnya pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat b. Terbatasnya sarana dan Prasarana c. Belum optimalnya Pengelolaan aset di Kecamatan d. Belum Optimalnya sistem kearsipan di Kecamatan

Tugas Pokok Dan Fungsi :

Struktur organisasi Kecamatan Kebakkramat berdasarkan Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari:

1. Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Untuk menyelenggarakan tugas, Camat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- c. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur pembantu Camat. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaporan, pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja;
- b. pengoordinasian kegiatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- d. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- e. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban.

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan peningkatan kesejahteraan rakyat dan kegiatan lingkup internal kecamatan maupun dengan pihak terkait di bidang kesejahteraan rakyat dan pelayanan sosial masyarakat.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penanganan kebencanaan serta penegakan peraturan daerah dan Peraturan Bupati di wilayah kecamatan.

7. Seksi Pelayanan Umum

Kepala Seksi Pelayanan umum mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan umum.

2.4 Review Terhadap rancangan awal RKPD

Review rancangan awal RKPD berisikan uraian mengenai proses rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2024
Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Kecamatan Kebakkramat						2.380.332.792,00							2.479.830.238,00	
7					UNSUR KEWILAYAHAN						2.380.332.792,00							2.479.830.238,00	
	7	01			KECAMATAN						2.380.332.792,00							2.479.830.238,00	
339	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.879.467.792,00					-		2.171.510.238,00	
	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.499.901.392,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih melayani dan inovatif serta peningkatan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi	-	-	1.691.212.238,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	1.495.901.392,00	- Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih melayani dan inovatif serta peningkatan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi	-		1.687.212.238,00	KECAMATAN KEBAKKRAMAT
	7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran													
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Dokumen	4.000.000,00	- Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih melayani dan inovatif serta peningkatan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi	-		4.000.000,00	KECAMATAN KEBAKKRAMAT
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	231.071.400,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih melayani dan inovatif serta peningkatan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi	-	-	161.353.000,00	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	35.935.700,00	- Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih melayani dan inovatif serta peningkatan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi	-		31.975.250,00	KECAMATAN KEBAKKRAMAT
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	1.782.150,00	- Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih melayani dan inovatif serta peningkatan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi	-		2.782.150,00	KECAMATAN KEBAKKRAMAT	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						12 Paket	19.482.000,00	- Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih melayani dan inovatif serta peningkatan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi	-		19.246.800,00	KECAMATAN KEBAKKRAMAT
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						12 Paket	19.537.550,00	- Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih melayani dan inovatif serta peningkatan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi	-		19.478.800,00	KECAMATAN KEBAKKRAMAT
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						12 Dokumen	1.920.000,00	- Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih melayani dan inovatif serta peningkatan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi	-		1.920.000,00	KECAMATAN KEBAKKRAMAT
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						12 Laporan	151.415.000,00	- Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih melayani dan inovatif serta peningkatan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi	-		84.950.000,00	KECAMATAN KEBAKKRAMAT
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						0 Dokumen	999.000,00	- Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih melayani dan inovatif serta peningkatan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi	-		1.000.000,00	KECAMATAN KEBAKKRAMAT
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	18.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih melayani dan inovatif serta peningkatan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi	-	-	32.000.000,00		

			01	01		2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					1 Unit	0,00	- Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih melayani dan inovatif serta peningkatan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi	-			0,00	KECAMATAN KEBAKKRAMAT
	7		01	01		2.07	0005	Pengadaan Mebel				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					1 Unit	0,00	- Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih melayani dan inovatif serta peningkatan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi	-			0,00	KECAMATAN KEBAKKRAMAT
	7		01	01		2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)									
1							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	18.800.000,00	- Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih melayani dan inovatif serta peningkatan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi	-		32.000.000,00	KECAMATAN KEBAKKRAMAT							
	7		01	01		2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	81.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih melayani dan inovatif serta peningkatan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi	-	-	237.380.000,00								
	7		01	01		2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																45.500.000,00	KECAMATAN KEBAKKRAMAT		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	43.200.000,00	- Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih melayani dan inovatif serta peningkatan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi	-		45.500.000,00	KECAMATAN KEBAKKRAMAT							
	7		01	01		2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																191.880.000,00	KECAMATAN KEBAKKRAMAT		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	38.400.000,00	- Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih melayani dan inovatif serta peningkatan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi	-		191.880.000,00	KECAMATAN KEBAKKRAMAT							
	7		01	01		2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	48.095.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih melayani dan inovatif serta peningkatan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi	-	-	49.565.000,00								
	7		01	01		2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																31.565.000,00	KECAMATAN KEBAKKRAMAT		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	32.895.000,00	- Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih melayani dan inovatif serta peningkatan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi	-		31.565.000,00	KECAMATAN KEBAKKRAMAT							
	7		01	01		2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																12.000.000,00	KECAMATAN KEBAKKRAMAT		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	12.200.000,00	- Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih melayani dan inovatif serta peningkatan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi	-		12.000.000,00	KECAMATAN KEBAKKRAMAT							
	7		01	01		2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																6.000.000,00	KECAMATAN KEBAKKRAMAT		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	3.000.000,00	- Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih melayani dan inovatif serta peningkatan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi	-		6.000.000,00	KECAMATAN KEBAKKRAMAT							

340	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	-	118.440.000,00	-	-	-	-	-	3.000.000,00	-					
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	-	-	118.440.000,00	-	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih melayani dan inovatif serta peningkatan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi	-	-	3.000.000,00	-					
No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
1	2				3	4	5	6	7	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		14	Target		Pagu Indikatif (Rp)	16	17	
	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan													-	-	-	3.000.000,00	KECAMATAN KEBAKKRAMAT
						Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-	-	-	2 Laporan	118.440.000,00	- Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih melayani dan inovatif serta peningkatan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi	-	-	3.000.000,00	-				
341	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	-	32.070.000,00	-	-	-	-	-	21.000.000,00	-					
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	-	-	32.070.000,00	-	-	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih melayani dan inovatif serta peningkatan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi	-	-	21.000.000,00	-				
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa													-	-	-	10.000.000,00	KECAMATAN KEBAKKRAMAT
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	-	-	1 Lembaga Kemasyarakatan	22.070.000,00	- Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih melayani dan inovatif serta peningkatan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi	-	-	10.000.000,00	-				
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													-	-	-	11.000.000,00	KECAMATAN KEBAKKRAMAT
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-	2 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih melayani dan inovatif serta peningkatan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi	-	-	11.000.000,00	-				
342	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	-	148.910.000,00	-	-	-	-	-	215.040.000,00	-					
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	148.910.000,00	-	-	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih melayani dan inovatif serta peningkatan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi	-	-	215.040.000,00	-				
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													-	-	-	215.040.000,00	KECAMATAN KEBAKKRAMAT
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	-	-	12 Laporan	148.910.000,00	- Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih melayani dan inovatif serta peningkatan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi	-	-	215.040.000,00	-				
343	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	-	154.820.000,00	-	-	-	-	-	52.480.000,00	-					
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-	-	154.820.000,00	-	-	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih melayani dan inovatif serta peningkatan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi	-	-	52.480.000,00	-				
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia													-	-	-	-	-

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				40 Orang	154.820.000,00	- Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih melayani dan inovatif serta peningkatan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi	-		52.480.000,00	KECAMATAN KEBAKKRAMAT
344	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	46.625.000,00					-	-	16.800.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	46.625.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih melayani dan inovatif serta peningkatan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi	-	-	16.800.000,00	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				10 Dokumen	46.625.000,00	- Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih melayani dan inovatif serta peningkatan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi	-		16.800.000,00	KECAMATAN KEBAKKRAMAT

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Penentuan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam perencanaan pembangunan daerah memegang peranan utama dalam mewujudkan berhasil-tidaknya pembangunan daerah. Beberapa capaian yang telah terwujud dan permasalahan yang dihadapi menjadi dasar dalam menentukan tujuan, sasaran, program dan kegiatan tahun berikutnya.

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, maupun program-program prioritas nasional khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun SDG's. Kebijakan nasional yang diampu oleh Kecamatan Ngargoyoso lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar

Telaahan terhadap kebijakan nasional menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Perbaikan ekonomi nasional dapat dilihat dari konsumsi rumah tangga dan investasi yang terus menunjukkan tren peningkatan, disertai pemulihan yang kuat di hampir semua sektor ekonomi termasuk transportasi, akomodasi dan konstruksi selain dua sektor utama yaitu manufaktur dan perdagangan.

Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 diarahkan pada “Peningkatan demokrasi dan kesejahteraan didukung pelaksanaan reformasi birokrasi (satu pintu, e government) serta penguatan SDM dan daya saing daerah”. Prioritas pada tahun 2024 adalah :

1. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih melayani dan inovatif serta peningkatan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi
2. Pemantapan kondusivitas wilayah dan penguatan ketahanan bencana
3. Perwujudan kualitas hidup SDM yang berdaya saing
4. Percepatan pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem
5. Peningkatan Kualitas Infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi

3.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kebakkramat

3.2.1 Tujuan

Tujuan pembangunan daerah adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan pada jangka waktu tertentu, dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah. Tujuan menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin.

Tujuan jangka menengah Kecamatan Kebakramat Kabupaten Karanganyar adalah **Meningkatkan Daya Saing Daerah**

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator kinerja). Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Kebakramat. Sasaran utama pembangunan di Kecamatan Kebakramat adalah **Meningkatkan tata pemerintahan yang ber kualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi.**

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Kebakramat beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 3.1

Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah Tahun 2018-2023

No.	Tujuan	Indikator Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran OPD	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2024
1	Meningkatkan Daya Saing Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan tata pemerintahan yang ber kualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	65,00
			Meningkatkan Kualitas tata laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	72,00

No.	Tujuan	Indikator Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran OPD	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2024
			Meningkatkan kondusifitas wilayah	Jumlah Kasus gangguan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan	Kasus	0
2	Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	Angka Kemiskinan			%	8,52
			Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Dengan Aplikasi E-IDM dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Tingkat Kecamatan	Indeks	0,70

3.3 Program dan Kegiatan Berisikan Penjelasan

Jumlah Program yang diakomodir dalam Renja Kecamatan Kebakkramat Tahun 2024 ada 6 Program antara lain sebagai berikut:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - c. Pengadaan Barang Milik Daerah
 - d. Penyedia Jasa Penunjang Urusa Pemerintah Daerah
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Di Laksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan.
- 3. Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan**
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
- 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**
 - a. Koordinasi Urusan Pemerintahan Umum
- 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
- 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

- a. Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

3.4. Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah

Tantangan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan di rencanakan serat antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi ril saat perencanaan dibuat.

3.4.1. Tantangan

Kecamatan sebagai salah satu SKPD yang merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat berupaya untuk mendukung pencapaian misi tersebut. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terdapat tantangan yang dihadapi yakni :

1. Kompetensi SDM masih perlu ditingkatkan
2. Sarana dan Prasaran yang belum memadai
3. Lemahnya managemen informasi data kecamatan
4. Belum maksimalnya koordinasi dari SKPD teknis yang mempunyai program terhadap kecamatan sebagai pemangku wilayah.

3.4.2. Peluang

Dalam melaksanakan pelayanan kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki, Kantor Kecamatan Kebakkramat diharapkan mampu untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanan public baik dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Adapun peluang yang bisa di maanfaatkan antara lain :

1. Adanya kesempatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
2. Mudahnya akses informasi yang lebih cepat dan tepat sehingga dapat meningkatkan profesionalisme kerja
3. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal untuk meningkatkan koordinasi dan konsultasi

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan perangkat Daerah
tahun 2024
Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Kebakkramat

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/K EGIATAN/SU B KEGIATAN	FORMULA SI	SATUA N	2024	
									Tar get	Rp
5					6	7	8	9	10	11
									72	2.301.480.000
7	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah indikator sasaran dan program di Kecamata n yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di Kecamata n dikali 100%	%	100	2.000.000.00 0
7	0	0	2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	bulan	12	1.562.322.00 0
7	0	0	2.	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah penyediaan	Jumlah pegawai	bulan	12	1.558.322.000

			2		ASN	gaji dan tunjangan ASN	yang menerima gaji			
7	0	0	2.	0	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Penyediaan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	dokumen	16	4.000.000
7	0	0	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	bulan	12	132.403.000
7	0	0	2.	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	Jumlah alat kebersihan kantor yang tersedia	bulan	12	31.975.250
7	0	0	2.	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Perlatan Rumah Tangga	Jumlah Perlatan Rumah Tangga	bulan	12	1.782.150
7	0	0	2.	0	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik	Jumlah bahan logistik yang tersedia	bulan	12	17.246.800
7	0	0	2.	0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	19.478.800
7	0	0	2.	0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	12	1.920.000
7	0	0	2.	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanak	bulan	12	60.000.000

							an			
7	0	0	2.		Pengadaan	Jumlah	Jumlah	unit	6	40.000.000
	1	1	0		Barang Milik	barang milik	barang			
			7		Daerah Penunjang	daerah	milik			
					Urusan	penunjang	daerah			
					Pemerintah	urusan	penunjang			
					Daerah	pemerintah	urusan			
						daerah yang	pemerintah			
						tersedia	daerah			
							yang			
							tersedia			
7	0	0	2.	0	Pengadaan	Jumlah	Jumlah	unit	1	-
	1	1	0	2	Kendaraan Dinas	Pengadaan	Kendaraan			
			7		Operasional atau	Kendaraan	Dinas			
					Lapangan	Dinas	Operasiona			
						Operasional	l atau			
						atau	Lapangan			
						Lapangan	yang			
							diadakan			
7	0	0	2.	0	Pengadaan	Jumlah	Jumlah	unit	1	
	1	1	0	5	Mebeleur	Mebeleur yang	Mebeleur			
			7			diadakan				
7	0	0	2.	0	Pengadaan	Jumlah	Jumlah	unit	3	40.000.000
	1	1	0	6	Peralatan dan	peralatan dan	peralatan			
			7		Mesin Lainnya	mesin lainnya	dan mesin			
						yang tersedia	lainnya			
							yang			
							tersedia			
7	0	0	2.	1	Pengadaan	Jumlah	Jumlah	unit	1	-
	1	1	1	1	Sarana dan	Sarana dan	Sarana			
			0		Prasarana	Prasarana	dan			
					Pendukung	Pendukung	Prasarana			
					Gedung Kantor	Gedung	Pendukung			
					atau Bangunan	Kantor atau	Gedung			
					Lainnya	Bangunan	Kantor			
						Lainnya	atau			
							Bangunan			
							Lainnya			
7	0	0	2.		Penyediaan Jasa	Jumlah	Jumlah	bulan	12	222.880.000
	1	1	0		Penunjang	penyediaan	penyediaan			
			8		Urusan	jasa	jasa			
					Pemerintahan	penunjang	penunjang			
					Daerah	urusan	urusan			
						pemerintahan	pemerintah			
						daerah	an daerah			

7	0	0	2.	0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayarkan	bulan	12	42.000.000
7	0	0	2.	0	Penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tenaga jasa pelayanan umum kantor yang dibayarkan	bulan	12	180.880.000
7	0	0	2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	bulan	12	42.395.000
7	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas dan dinas jabatan	Jumlah pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas dan dinas jabatan yang dilaksanakan	bulan	12	31.565.000
7	0	0	2.	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	bulan	12	10.830.000
7	0	0	2.	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan yang direhab dan terpelihara	bulan	12	

7	0	0			PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sebagai hasil pelaksana an Survey Kepuasan Masyaraka t di wilayah Kecamata n	nilai	85	3.000.000
7	0	0	2.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggara an kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Jumlah fasilitasi koordinasi penyelengg araan kegiatan pemerintah an di Kecamatan	laporan	14	3.000.000
7	0	0	2.	0	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	laporan	2	3.000.000
7	0	0			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif	Jumlah wilayah dalam keadaan kondusif dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamata n dikali 100%	%	100	210.000.000

7	0	0	2.		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	laporan	12	210.000.000
7	0	0	2.	0	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan	12	210.000.000
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase desa/kelurahan tertib perda	Jumlah wilayah dalam tertib Perda dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100%	%	100	52.480.000
7	0	0	2.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	kegiatan	1	52.480.000

7	0	0	2.	0	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan undang undang dasar negara Republik indonesia Tahun 1945, Pelestraian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahann dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia .	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	kegiata n	1	52.480.000
7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakan aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif dibagi jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dikali 100%	%	100	20.000.000

7	0	0	2.		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	laporan	3	20.000.000
7	1	3	0	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	lembaga kemasyarakatan	1	10.000.000
7	1	3	0	1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	2	10.000.000
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPBDes yang sesuai ketentuan	Jumlah desa yang memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh desa diwilayah Kecamatan dikali 100%	%	100	16.000.000

7	0	0	2.		Fasilitasi, Rekomendasi & Koordinasi Pembinaan & Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah fasilitasi, rekomenda si dan koordinasi dan pengawasa n pemerintah an desa	dokum en	38	16.000.000
7	0	0	2.	0	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administra si Tata Pemerintah an Desa	dokum en	9	16.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KEBAKKRAMAT

4.1. Program dan Kegiatan Kecamatan Kebakkramat

Beberapa program dan kegiatan perlu ditetapkan dan dilakukan, agar tujuan dan sasaran di Tahun 2024 tercapai. Penentuan program dan kegiatan disamping memperhatikan tujuan dan sasaran, juga perlu memperhatikan kemampuan keuangan daerah, tingkat urgensi kegiatan, serta adanya asas pemerataan.

Program dan kegiatan apakah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di tahun 2024. Disamping itu penentuan program dan kegiatan juga mengacu pada RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 - 2026, Renstra OPD. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka program dan kegiatan Kecamatan Ngargoyoso di tahun 2024 adalah sebagaimana tertulis dalam berikut ini:

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 adalah sebagai berikut (lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.1) :

Tabel 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KEBAKKRAMAT TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH		: KECAMATAN KEBAKKRAMAT													
TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025	
												Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi														
		Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP OPD									72	2.524.645.238	73	2.668.315.238
				7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah indikator sasaran dan program di Kecamatan yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di Kecamatan dikali 100%	%	100	2.207.840.238	100	2.351.510.238
				7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	bulan	12	1.691.212.238	12	1.691.212.238
				7	01	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang menerima gaji	bulan	12	1.687.212.238	12	1.687.212.238
				7	01	01	2.02	08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Penyediaan Dokumen Perangkat	Jumlah Dokumen	dokumen	16	4.000.000		4.000.000
				7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	bulan	12	158.353.000	12	160.353.000
				7	01	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	Jumlah alat kebersihan kantor yang tersedia	bulan	12	31.975.250	12	31.975.250
				7	01	01	2.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Perlitan Rumah Tangga	Jumlah Perlitan Rumah Tangga	bulan	12	1.782.150		2.782.150
				7	01	01	2.06	04 Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik	Jumlah bahan logistik yang tersedia	bulan	12	18.246.800	12	19.246.800
				7	01	01	2.06	05 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	19.478.800	12	19.478.800
				7	01	01	2.06	06 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	12	1.920.000	12	1.920.000
				7	01	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	bulan	12	84.950.000	12	84.950.000
				7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	unit	5	85.000.000	29	72.000.000
				7	01	01	2.07	02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	unit	1	30.000.000	1	30.000.000
				7	01	01	2.07	05 Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan	Jumlah Mebeleur	unit	1	10.000.000	25	10.000.000
				7	01	01	2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	unit	2	45.000.000	2	32.000.000
				7	01	01	2.10	11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	1	-	1	

				7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	bulan	12	230.880.000		234.380.000
				7	01	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayarkan	bulan	12	42.000.000	12	42.500.000
				7	01	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tenaga jasa pelayanan umum kantor	bulan	12	188.880.000	12	191.880.000
				7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	bulan	12	42.395.000		193.565.000
				7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas dan dinas jabatan yang dilaksanakan	Jumlah pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas dan dinas jabatan yang dilaksanakan	bulan	12	31.565.000	12	31.565.000
				7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	bulan	12	10.830.000	12	12.000.000
				7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan yang tidak dapat terakumulasi	bulan	12		12	150.000.000
				7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di wilayah Kecamatan	nilai	85	3.000.000	86	3.000.000
				7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	laporan	14	3.000.000	14	3.000.000
				7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	laporan	2	3.000.000	2	3.000.000
		Meningkatkan kondusifitas wilayah	Jumlah Kasus gangguan keamanan, ketertiban, dan													
				7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif	Jumlah wilayah dalam keadaan kondusif dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100%	%	100	215.040.000	100	215.040.000
				7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	laporan	12	215.040.000	12	215.040.000
				7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan	12	215.040.000	12	215.040.000
				7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase desa/kelurahan tertib perda	Jumlah wilayah dalam tertib Perda dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100%	%	100	52.480.000	100	52.480.000
				7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	kegiatan	1	52.480.000	2	52.480.000
				7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan undang undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestraian Bhineka Tunggal Ika serta	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	kegiatan	1	52.480.000	2	52.480.000

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Kebakkramat Tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Ngargyoso Tahun 2024 - 2026 dalam target dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024- 2026

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan bidang perencanaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Kebakkramat Tahun 2024. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Kebakkramat harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi Kecamatan Kebakkramat .

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kebakkramat Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya
2. Renja Kecamatan Kebakkramat Tahun 2024 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Kebakkramat Tahun 2024

5.3 Rencana Tindak Lanjut

- 1. Perlu penguatan kelembagaan dan peran masing-masing stakeholder dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan kelitbangan
- 2. Perlunya upaya sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan terutama untuk pencapaian indikator kinerjanya
- 4. Diperlukannya kebijakan strategis dan inovatif dalam penyelarasan penyelesaian permasalahan perencanaan dan kelitbangan dengan keterlibatan berbagai pihak, sesuai dengan kewenangan, aturan dan dapat dipertanggungjawabkan
- 5. Perlunya monitoring dan evaluasi dalam implementasi Rencana Kerja Baperlitbang yang telah diusulkan dan ditetapkan
- 6. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, dan pelaksanaan di masyarakat sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Rencana Kerja Kecamatan Kebakkramat Tahun 2024 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Kecamatan Kebakkramat secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten. Dengan sumber daya manusia yang terbatas dan teknologi yang semakin maju serta etos kerja yang baik diharapkan mampu merubah pola pikir/ *mindset*.

Semoga Renja Kecamatan Kebakkramat Tahun 2024 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Renja ini.

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO

